



RENCANA KERJA PERUBAHAN 2025

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B. No. 14

**DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA PERKEBUNAN
DAN KETAHANAN PANGAN**

TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang bersumber dari Rencana Strategi (RENSTRA) OPD, dengan mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi acuan perumusan program, kegiatan indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD.

Proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi RKPD harus berdasarkan hasil verifikasi Renja OPD sehingga antara renja OPD dengan dokumen RKPD mempunyai keterkaitan yang sama-sama disusun berdasarkan program prioritas pembangunan daerah yang berpedoman pada RPJMD.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 Dinas Tanaman Pangan Perkebunan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang disusun berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 berpedoman pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025. Visi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu *"Terwujudnya Sidenreng Rappang sebagai salah satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025"*, dijabarkan pada 3 visi yang salah satunya mendukung pelaksanaan kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan yaitu **Sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis**. Pusat pengembangan Agribisnis dimaksud mencakup 4 (empat) kegiatan utama yaitu usaha tani, pengolahan, pemasaran dan jasa-jasa.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Perkebunan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang yang sasaran pelaksanaan senantiasa diletakkan pada pengarahannya potensi sumber daya alam dan strategi pembangunan daerah yang dikembangkan dan disinergikan dengan sumber daya manusia. Pendekatan ini dilakukan secara terintegrasi dan dimaksudkan agar

semua komponen dalam pembangunan pertanian terakumulasi dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan disusun melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- 3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

I.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2025 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13);

16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 9);

I.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran terhadap Rencana Kerja Tahun 2025 yang akan dibahas dalam rumusan rencana Kegiatan berdasarkan Program Prioritas.
- b. Pembahasan Kerangka Regulasi pembiayaan ke dalam kegiatan prioritas.
- c. Sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunannya Rencana Kerja Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

- a. Terciptanya sinergisitas antara bidang dalam lingkup satuan kerja perangkat daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b. Terakumulasinya usulan hasil musrenbang dalam kerangka aspiratif masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.
- d. Mengkompilasi berbagai usulan program/kegiatan tentang pelaksanaan kegiatan urusan pertanian dan pangan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.
- e. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.

- f. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Perkebunan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya;

Bab II: Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan

Bab ini berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;

Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Urusan/bidang urusan/program/kegiatan beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi uraian berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Adapun total anggaran belanja Tahun 2025 sebesar Rp 17.204.488.000,- yang bersumber dari APBD DAU dan DAK yang terdiri dari 8 program, 16 kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan realisasi sampai pada triwulan I yaitu realisasi keuangan Rp 2.561.499.513,- (14,89%) dan realisasi fisik 20,75%. Hal ini disebabkan adanya usulan kegiatan tambahan yang berfokus stunting, Pokok Pikiran Anggota DPRD dan kegiatan belum terealisasi 100% sampai pada triwulan I tahun 2025 dikarenakan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan ini menyajikan hasil pelaksanaan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana terdapat pada Tabel II.1.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 terdiri :

1. Realisasi program yang belum memenuhi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
 - 1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka

- Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan target kinerja capaian sampai dengan tahun 2024-2026 yaitu 100% yang terealisasi 5,00% disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.
- 2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dengan target kinerja capaian sampai dengan tahun 2024-2026 yaitu 100% yang terealisasi 33,33% disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.
 - 3) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun seusia dengan Angka Kecukupan Gizi dengan target kinerja capaian sampai dengan tahun 2024-2026 yaitu 100% yang terealisasi 16,67% disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.
 - 4) Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target kinerja capaian sampai dengan tahun 2024-2026 yaitu 100% tapi belum terealisasi disebabkan kegiatan tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2025.
 - 5) Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja capaian sampai dengan tahun 2024-2026 yaitu 100% tapi belum terealisasi disebabkan kegiatan tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2025.
 - 6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja capaian sampai dengan tahun 2024-2026 yaitu 100% yang terealisasi 42,86% disebabkan proses administrasi.
 - 7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target target kinerja capaian program sampai dengan tahun 2024-2026 yaitu 100% yang terealisasi 39,28% disebabkan proses administrasi.

- 8) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target kinerja capaian program sampai dengan tahun 2024-2026 yaitu 100% yang terealisasi 33,33% disebabkan proses administrasi.
- 9) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 31,91% disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.
- 10) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 33,33% disebabkan proses administrasi.
- 11) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 14,69% disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.
- 12) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dengan target 100% yang terealisasi 21,26% disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.
- 13) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan target 100% yang terealisasi 35,42% disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.
- 14) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian dengan target 100% yang terealisasi 41,50% disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.
- 15) Program Penyuluhan Pertanian dengan kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan target 100% yang terealisasi 11,17% disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.

Berdasarkan rincian kegiatan diatas yang belum melebihi target kinerja secara umum dikarenakan sisa target yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

2. Realisasi program yang melebihi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

- 16) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan target 100% yang terealisasi 182,40% disebabkan lahan yang dikendalikan lebih luas dari target yang ditentukan.

Program dan Kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan untuk target kinerja capaian program tahun 2024-2026 secara keseluruhan belum mencapai target atau melebihi target kinerja dan akan dilaksanakan sisa target kinerja pada tahun selanjutnya.

3. Pada target kinerja capaian program sampai dengan tahun 2024-2026 yang belum mencapai target yaitu:

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan target kinerja capaian program tahun 2024-2026 yaitu 1.065,30% yang terealisasi 8,33% disebabkan ketersediaan pangan belum memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

- 2) Program Penanganan Kerawanan Pangan target kinerja capaian program tahun 2024-2026 yaitu 20,00% belum terealisasi disebabkan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan pada tahun 2024 dan mulai dilaksanakan lagi pada tahun 2025.

- 3) Program Pengawasan Keamanan Pangan target kinerja capaian program tahun 2024-2026 yaitu 85,00% belum terealisasi disebabkan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan pada tahun 2024 dan mulai dilaksanakan lagi pada tahun 2025.

- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja capaian program tahun 2024-2026 yaitu 100,00% dan terealisasi 32,57% disebabkan program tersebut masih berjalan sampai tahun 2026.

- 5) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan target kinerja capaian program tahun 2024-2026 yaitu 628,33% dan terealisasi 536,43% disebabkan dampak dari kekeringan disertai cuaca yang tidak mendukung dan sarana pertanian pengendalian kekeringan dan banjir yg kurang sehingga proses produksi terhambat.
 - 6) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan target kinerja capaian program tahun 2024-2026 yaitu 100% dan terealisasi 95,24% disebabkan target yang ditentukan tidak dapat dimaksimalkan pada tahun 2024 dan akan dilanjutkan pada tahun 2025.
 - 7) Program Penyuluhan Pertanian dengan target kinerja capaian program tahun 2024-2026 yaitu 7,39% dan terealisasi 2,89% disebabkan banyaknya penyuluh pertanian yang pensiun dan masih kurangnya SDM yang baru sedangkan kelompok tani tiap waktu bertambah.
4. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu:
- 1) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan target kinerja capaian program tahun 2024-2026 yaitu 100% dan terealisasi 182,40% disebabkan adanya fenomena yang terjadi pasca banjir akan terjadi peledakan OPT sehingga lahan yang dikendalikan lebih luas.
5. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu:
- a. Adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan sehingga sedikit menghambat pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan perangkat daerah.
 - b. Kurang memadainya sarana dan prasarana (peralatan komputer) sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
 - c. Kurangnya sumber daya manusia untuk menunjang pencapaian kinerja pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidereng Rappang.
 - d. Kurang maksimalnya kegiatan pembinaan akibat pembatasan gerak dan keterbatasan dana operasional.

- e. Kesalahan prediksi target dan tidak adanya tindak lanjut kegiatan juga menjadi faktor penyebab.
 - f. Adanya perubahan anggaran untuk dialokasikan untuk penanganan Covid-19.
6. Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra SKPD
- Implikasi yang timbul terhadap capaian Program Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan tahun 2025 yaitu :
- a. Program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
 - b. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD yang telah ditetapkan dalam Renstra.
 - c. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan.
7. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target yaitu alokasi dana yang tidak memadai untuk melaksanakan kegiatan agar target tercapai.
- a. Untuk memaksimalkan kinerja, kegiatan yang bersifat pembinaan diperlukan biaya operasional yang cukup.
 - b. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan.
 - c. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota.
 - d. Kerja sama dengan pihak stakeholder maupun SKPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.

- e. Untuk kegiatan Infrastruktur Pertanian terutama yang sumber dananya dari APBN perlu disiapkan dana pendamping untuk desain, pengawasan dan operasional dalam rangka mendukung program prioritas kabinet kerja bidang pertanian.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja perubahan Dinas Tanaman Pangan Perkebunan Hortikultura dan Ketahanan Pangan s/d Tahun 2025 (tahun berjalan) pada tabel II.1.

Tabel II. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama SKPD : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
 Lembar : 1 dari 7 Halaman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=(9/4*100)
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)	%	1.065,30	3,33	5,00	-	-	8,33	0,78
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Cakupan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	%	100,00	100,00	100,00	-	-	5,00	5,00
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	3	-	-	-	-	-	-
2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Laporan	3	4	2	-	-	4	133,33
2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan	10	-	-	-	-	-	-

Rencana Kerja Perubahan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Laporan	36	-	-	-	-	-	-
2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	1	1	-	-	1	33,33
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Laporan	3	-	-	-	-	-	-
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Dokumen	36	-	-	-	-	-	-
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	6	-	-	-	-	-	-
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	-	-	33,33	33,33
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	12,00	4,00	2,00	-	-	4,00	33,33
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	%	100,00	88,41	100,00	-	-	16,67	16,67
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	6	1	1	-	-	1,00	16,67
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	20,00	-	16,67	-	-	-	-
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten	%	100,00	-	100,00	-	-	-	-
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	3,00	-	1	-	-	-	-
2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Dokumen	3,00	-	1	-	-	-	-

Rencana Kerja Perubahan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan yang Aman Dikonsumsi Sesuai Standar	%	85,00	-	100,00	-	-	-	-
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten	%	100,00	-	100,00	-	-	-	-
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	-	-	-	-	-	-
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	3	-	-	-	-	-	-
2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Laporan	3	-	1	-	-	-	-
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	29,52	100,00	3,05	3,05	32,57	32,57
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100,00	33,33	100,00	9,52	9,52	42,86	42,86
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	5	6	1	16,67	6,00	40,00
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	2	2	1	50,00	3,00	50,00
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100,00	33,33	28,97	5,95	20,54	39,28	39,28
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	4.452	1.484	1.288	264,00	20,50	1.748,00	39,26
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	36	12	12	3	25,00	15,00	41,67

Rencana Kerja Perubahan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	33,33	33,33	-	-	33,33	33,33
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	1	1	-	-	1,00	33,33
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	1	1	-	-	1,00	33,33
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100,00	31,91	193,62	-	-	31,91	31,91
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	37	8	81	-	-	8,00	21,62
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	7	10	-	-	7,00	70,00
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	33,33	33,33	-	-	33,33	33,33
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	1	1	-	-	1	33,33
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	12	12	-	-	12	33,33
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	1	1	-	-	1	33,33
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100,00	11,86	46,89	2,82	6,02	14,69	14,69
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	93	18	49	5,00	10,20	23	24,73
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	81	2	33	-	-	2	2,47

Rencana Kerja Perubahan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	1	1	-	-	1	33,33
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	%	628,33	536,43	596,06	-	-	536,43	85,37
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	%	100,00	27,78	27,78	-	-	84,95	84,95
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	6	1	1	-	-	1	16,67
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	12	4	4	-	-	4	33,33
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	%	100,00	95,24	100,00	-	-	95,24	95,24
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian	%	100,00	29,17	33,33	6,25	18,75	35,42	35,42
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	36	12	14	3	21,43	15	41,67
3.27.03.2.01.0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	6	2	2	-	-	2	33,33
3.27.03.2.01.0008	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	3	-	-	-	-	-	-
3.27.03.2.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	3	-	-	-	-	-	-
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Pembangunan Prasarana Pertanian	%	100,00	40,82	2,72	0,68	25,00	41,50	41,50

Rencana Kerja Perubahan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	24	-	1	-	-	-	-
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	57	16	1	1	100,00	17	29,82
3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	15	1	-	-	-	1	6,67
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	15	-	1	-	-	-	-
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4	3	1	-	-	3	75,00
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	32	40	-	-	-	40	125,00
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	%	100,00	68,42	100,00	97,39	97,39	182,40	182,40
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	100,00	68,42	100,00	97,39	97,39	182,40	182,40
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	1.500,00	1.129,00	10.000,00	1.607,00	16,07	2.736,00	182,40
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	150,00	-	-	-	-	-	-
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	%	7,39	2,89	2,46	-	-	2,89	39,11

Rencana Kerja Perubahan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan I Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	%	100,00	11,17	51,27	-	-	11,17	11,17
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	33	11	11	-	-	11	33,33
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	75	-	75	-	-	-	-
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	11	5	11	-	-	5	45,45
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	9	4	3	-	-	4	44,44
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	60	-	-	-	-	-	-
3.27.07.2.01.0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	3	1	1	-	-	1	33,33
3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Unit	3	-	-	-	-	-	-
3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Dokumen	3	1	-	-	-	1	33,33

II.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategi adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal yang tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis dapat diperoleh melalui analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman di masa lima tahun mendatang.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan. Dalam struktur organisasi perangkat daerah baru ini setiap bidang dibedakan berdasarkan subsektor yang ditangani, yaitu Bidang Tanaman Pangan yang menangani sub sektor tanaman pangan, Bidang Hortikultura dan Perkebunan yang menangani sub sektor Hortikultura dan Perkebunan, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian yang menangani sub sektor Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Ketahanan Pangan yang menangani sub sektor ketahanan pangan, Bidang Penyuluhan Pertanian yang menangani sub sektor penyuluhan Pertanian. Bentuk organisasi ini memungkinkan adanya penanganan yang lebih fokus terhadap masing-masing sub sektor serta mempermudah jalur koordinasi dan konsultasi dengan instansi vertikal sehingga diharapkan pencapaian tujuan organisasi lebih efektif.

Berdasarkan permasalahan dan hasil telaahan yang telah dilakukan, maka isu-isu untuk bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang mencakup aspek seperti: 1) perubahan iklim global dan meningkatnya kerusakan lingkungan; 2) peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan; 3) ketersediaan infrastruktur, dan sarana produksi pertanian; 4) alih fungsi lahan serta status dan kepemilikan lahan; 5) lemahnya kapasitas

kelembagaan petani dan penyuluh pertanian; 6) akses petani terhadap permodalan; 7) perbaikan citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus; 8) peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal; 9) peningkatan distribusi, harga dan akses pangan; 10) penjaminan stabilitas harga dan pasokan pangan; 10) penjaminan stabilitas harga dan pasokan pangan; dan 11) dampak pandemic *covid-19*. Isu-isu strategis tersebut dapat diurai sebagai berikut:

1. Perubahan Iklim Global dan Meningkatnya Kerusakan Lingkungan

Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Sejak tahun 1998 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat Celcius, sehingga diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2 – 3 persen per tahun.

Di sektor pertanian dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama penyakit serta pada akhirnya terjadi penurunan produksi pertanian. Oleh karena itu diperlukan upaya khusus untuk pemetaan daerah rawan banjir dan kekeringan. Namun ditingkat lapangan kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas sehingga kurang mampu melakukan antisipasi, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat terjadi sehingga perlu peningkatan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi dan adaptasi yang diperlukan.

2. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan

Kondisi produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang diproduksi oleh petani di sentra-sentra produksi masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena belum diterapkannya aplikasi paket teknologi sesuai anjuran. Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi pertanian. Selanjutnya untuk

meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, maka dikembangkan pula hilirisasi komoditas pertanian strategis. Hilirisasi mencakup kegiatan pertanian secara terpadu mulai dari pengolahan sampai penanganan dan pemasaran hasil pertanian.

Selain itu, sebagian besar produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan masih belum mampu mencapai standar mutu untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan budidaya yang berdasarkan standar prosedur baku, melaksanakan prinsip-prinsip *Good Agriculture Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP), serta mendorong petani agar menerapkan teknologi budidaya yang ramah lingkungan.

3. Ketersediaan Infrastruktur, dan Sarana Produksi Pertanian

a. Jaringan Irigasi

Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi petani sangat menurun. Kerusakan terutama diakibatkan banjir dan erosi serta desakan pemukiman dan campur tangan manusia menyebabkan kerusakan sumber daya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usahatani. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai, pemeliharaan jaringan yang sudah ada, pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan bawah tanah, pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber air tanah, danau, rawa dan air hujan.

b. Jalan Usaha Tani/Jalan Pertanian/Jalan Produksi

Jalan usaha tani adalah jalan pertanian/jalan produksi yang dapat digunakan untuk mengangkut sarana produksi dari luar ke lahan usaha tani dan atau mengangkut hasil panen ke pasar dan atau ke unit pengolahan

c. Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan

usahatani, jalan produksi, laboratorium uji standar dan mutu, kebun dan *griehhouse* untuk penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan, balai informasi dan promosi pertanian, serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas. Tantangan yang harus dihadapi kedepan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini dalam jumlah yang cukup dan berada dekat dengan sentra produksi dan biaya pelayanan yang terjangkau.

- d. Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul yang bermutu, pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi, serta belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas disentra produksi.

Pupuk merupakan sarana produksi yang seringkali menjadi langkah pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi, dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih unggul dan bermutu, menumbuhkan kembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani untuk memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman yang ramah lingkungan.

4. *Alih Fungsi Lahan Serta Status dan Luas Kepemilikan Lahan*

Kepemilikan lahan cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Kondisi kepemilikan lahan tersebut disebabkan antara lain, meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum serta terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, khususnya untuk lahan beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman pangan. Selain itu status penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat

dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan.

Alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi juga degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani sehingga kegiatan ushatani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak baginya.

Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya kepemilikan dan lemahnya penguasaan lahan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas usahatani, penataan kelembagaan pengelolaan lahan, serta penguatan status kepemilikan lahan. Untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang, regulasi atau peraturan, meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

5. Lemahnya Kapasitas Kelembagaan Petani dan Penyuluh Pertanian

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A), Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) dihadapkan pada tantangan ke depan untuk menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang di pedesaan.

6. Keterbatasan Akses Petani terhadap Permodalan

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Selain itu petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses

sumber permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan.

Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal dengan masyarakat petani yang tersebar di perdesaan. Perlu dilakukan pula pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok dan diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani perdesaan.

7. *Perbaiki Citra Petani dan Pertanian Agar Kembali Diminati Generasi Penerus*

Belum berkembangnya agroindustri di perdesaan, sehingga usaha tani masih dominan di aspek produksi *on-farm* dengan tingkat pendapatan yang relatif kecil dan belum berkembangnya usaha jasa pelayanan permodalan, dan teknologi, menyebabkan citra petani dan pertanian lebih sebagai aktivitas sosial budaya tradisional, bukan sosial ekonomi yang dinamis dan menantang. Kondisi ini pada akhirnya kurang menarik minat generasi muda di perdesaan untuk bekerja dan berusaha di bidang pertanian, terlebih bagi mereka yang telah mengikuti pendidikan sekolah menengah ke atas. Oleh karena itu ke depannya perlu upaya pemantapan pengembangan agroindustri di perdesaan. Selain itu, perlu juga mendorong pengembangan mekanisasi pertanian (alsintan tepat guna) agar bidang pertanian lebih menarik generasi muda selain untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, nilai tambah, efisiensi dan daya saing produksi komoditas pertanian.

8. *Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis pada Pangan Lokal*

Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih rendah. Konsumsi pangan dengan bahan baku dari terigu terus mengalami peningkatan. Diversifikasi pangan dengan meningkatkan konsumsi pangan lokal dapat dilakukan, namun pangan lokal masih belum mengalami banyak perkembangan. Faktor penyebab belum berkembangnya pangan lokal adalah : (a) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya, (b) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah

ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat dan swasta, (c) belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal, (d) rendahnya citra pangan lokal.

9. Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan

Kapasitas produksi lokal/domestik, menghadapi permasalahan antara lain: (a) laju peningkatan produksi pangan cenderung melandai sedangkan laju pertumbuhan penduduk lebih besar dari 2% setiap tahunnya; (b) belum berkembangnya kapasitas produksi pangan daerah dengan teknologi spesifik lokasi karena hambatan infrastruktur pertanian; (c) petani umumnya skala kecil (kurang dari 0,5 hektar), aksesibilitasnya terbatas terhadap sumber permodalan, teknologi, sarana produksi dan pasar relatif sangat kurang; (d) banyak dijumpai kasus terhambatnya distribusi sarana produksi seperti pupuk bersubsidi; dan (e) lambatnya penerapan teknologi akibat kurang insentif ekonomi dan masalah sosial petani.

Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran pertanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan) memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya: (a) sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan, (b) cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (c) kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (d) sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya.

Timbulnya kerawanan pangan disebabkan karena produksi pangan yang kurang (tidak cukup untuk kebutuhan masyarakat) atau pangan tidak terjangkau karena daya beli masyarakat yang terbatas, anomaly iklim dan/atau karena pangan tidak terjangkau secara fisik oleh masyarakat terutama yang berada di daerah terpencil/terisolir. Antisipasi dan penanganan masalah kerawanan pangan (pra dan pasca kejadian) belum merata karena terbatasnya anggaran sarana dan prasarana serta koordinasi antara instansi terkait belum optimal.

10. Peningkatan Distribusi, Harga dan Akses Pangan

Kelancaran distribusi dan akses pangan, permasalahan yang dijumpai adalah: (a) infrastruktur distribusi, (b) sarana dan prasarana pasca panen, (c) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, (d) sistem informasi pasar, (e) keterbatasan Lembaga pemasaran daerah, (f) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (g) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (h) adanya penurunan akses pangan pangan karena terkena bencana.

11. Penjaminan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

Isu stabilitas harga pangan penting karena masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa paceklik dan rendah pada waktu musim panen. Selain itu, harga pangan di Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu, dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

12. Dampak Pandemi Covid-19

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 dan di Indonesia, Presiden RI telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan menetapkan sebagai bencana nasional melalui Kepres 12/2020.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020, Presiden memutuskan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai instrumen utama untuk mencegah penularan *Covid-19*. Dengan adanya kebijakan PSBB tersebut, terdapat penutupan akses transportasi yang mengakibatkan pengurangan mobilitas dan aktivitas penduduk sehingga berakibat terhambatnya pergerakan (rantai pasok distribusi) barang dan jasa termasuk berbagai produk pertanian. Meskipun untuk angkutan komoditas pangan tetap diizinkan, namun para pelaku distribusi (pedagang) memiliki kekhawatiran atas wabah pandemi ini sehingga tetap berpengaruh terhadap pergerakan barang komoditas pangan. Jika

kendala ini terjadi dalam jangka panjang, maka dapat berdampak pada terganggunya *supply* komoditas pangan.

Perubahan dari sisi *supply* dan *demand* pangan tersebut pada gilirannya berdampak pada tingkat harga pangan. Untuk komoditas pangan utama, perubahan harga pangan akan berdampak pada perubahan konsumsi dan permintaan karena terkait daya beli pangan yang dibutuhkan. Gangguan terhadap distribusi pangan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas, kesegaran, keamanan pangan serta akses pasar. Selain dampak pandemi *Covid-19* terhadap distribusi bahan pangan dengan terhambatnya layanan transportasi bahan pokok, juga berdampak terhadap pelaku usaha distribusi bahan pokok.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan pada Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024-2026. Rencana kerja dan pendanaan tersebut juga memperhatikan sumber-sumber pendanaan (seperti APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, DAK dan lain-lain) yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Perumusan perubahan rencana kerja program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 tersebut telah mempertimbangan beberapa faktor, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran daerah dan sasaran perangkat daerah, visi dan misi kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dan tema pembangunan pada tahun 2025 dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Pada tahun 2025 jumlah anggaran dana/pagu indikatif pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan yang bersumber dari DAU. Rencana Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang sebelum mengalami perubahan sebesar Rp 23.104.605.160,- dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar Rp 16.702.303.000,-. Adapun rincian perubahan rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 dapat dilihat Tabel III.1.

Tabel III.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

Perangkat Daerah : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
 Lembar : 1 dari 9 Halaman

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)		769,10%	500.000.000			5,00%	149.563.000	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Cakupan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		100%	140.000.000			100%	55.840.000	
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	5.000.000	Masyarakat	-	-	-	-
2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	2 Laporan	75.000.000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	2 Laporan	43.399.000	Masyarakat
2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	5.000.000	Masyarakat	-	-	-	-

Rencana Kerja Perubahan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	5.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-
2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	35.000.000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	12.441.000	Masyarakat
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	5.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Dokumen	5.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	5.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		100%	320.000.000			100%	41.043.000	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	20 Ton	320.000.000	Masyarakat	Kab. Sidenreng Rappang	44 Ton	41.043.000	Masyarakat
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		100%	40.000.000			100%	52.680.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	40.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	52.680.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan		30,00%	50.000.000			16,67%	31.000.000	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten		100%	50.000.000			100%	31.000.000	
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	10.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	23.500.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	40.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	7.500.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan yang Aman Dikonsumsi Sesuai Standar		75%	18.650.000			100%	10.750.000	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten		100%	18.650.000			100%	10.750.000	
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	8.650.000	Masyarakat	-	-	-	-
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	5.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	5.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	10.750.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	12.022.349.560			100%	12.203.661.000	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	40.000.000			100%	28.942.000	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	6 Dokumen	25.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	6 Dokumen	15.337.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	2 Laporan	15.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	2 Laporan	13.605.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	10.886.130.560			100%	9.765.332.000	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	105 Orang/Bulan	10.866.130.560	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1288 Orang/Bulan	9.747.591.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	12 Dokumen	20.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Dokumen	17.741.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Rencana Kerja Perubahan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	202.850.000			100%	155.009.000	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Paket	2.850.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Paket	2.875.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	200.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	152.134.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah		100 %	211.000.000			100 %	416.806.000	
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	61 Unit	66.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	81 Unit	52.126.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	16 Unit	145.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	10 Unit	364.680.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	552.750.000			100 %	1.682.697.000	
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	1.500.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	1.500.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	66.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	66.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	485.250.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	1.615.197.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100 %	129.619.000			100 %	154.875.000	
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sidenreng Rappang	47 Unit	85.069.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	49 Unit	95.415.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	27 Unit	14.550.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	33 Unit	14.460.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	30.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	45.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun		611,85%	521.150.000	-		6,12%	932.959.000	-
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		100 %	521.150.000	-		100 %	932.959.000	-

Rencana Kerja Perubahan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Sidenreng Rappang	2 Laporan	501.150.000	Kelompok Tani	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	176.631.000	Kelompok Tani
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Sidenreng Rappang	4 Laporan	20.000.000	Kelompok Tani	Kab. Sidenreng Rappang	4 Laporan	756.328.000	Kelompok Tani
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian		100%	8.404.990.000			100%	849.680.000	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian		100 %	55.000.000			100 %	411.030.000	
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	25.000.000	Petani	Kab. Sidenreng Rappang	14 Laporan	400.422.500	Petani
3.27.03.2.01.0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Kab. Sidenreng Rappang	2 Unit	10.000.000	Kelompok Tani	Kab. Sidenreng Rappang	2 Unit	10.607.500	Kelompok Tani
3.27.03.2.01.0008	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	10.000.000	Kelompok Tani	-	-	-	-
3.27.03.2.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	10.000.000	Kelompok Tani	-	-	-	-
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Pembangunan Prasarana Pertanian		100 %	8.349.990.000			100 %	438.650.000	
3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	6 Unit	600.000.000	Kelompok Tani	Kec. Wt. Sidenreng	1 Unit	200.000.000	Kelompok Tani
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	14 Unit	2.100.000.000	Kelompok Tani	Kec. Pitu Riase	1 Unit	200.000.000	Kelompok Tani

Rencana Kerja Perubahan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	119.990.000	Kelompok Tani	-	-	-	-
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	150.000.000	Penyuluh	-	-	-	-
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	3 Unit	1.500.000.000	Kelompok Tani	Kec. Pitu Riase	1 Unit	38.650.000	Kelompok Tani
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang	28 Unit	3.880.000.000	-	-	-	-	-
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)		100 %	250.000.000			100 %	1.451.632.500	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		100 %	250.000.000			100 %	1.451.632.500	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kab. Sidenreng Rappang	500 Ha	200.000.000	Petani	Kab. Sidenreng Rappang	10.000 Ha	1.431.837.500	Petani
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Kab. Sidenreng Rappang	50 Ha	50.000.000	Petani	Kab. Sidenreng Rappang	5 Ha	19.795.000	Petani
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani		2,49%	1.337.465.600			4,93%	1.073.057.500	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		100 %	1.337.465.600			100 %	1.073.057.500	

Rencana Kerja Perubahan 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2025							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Sidenreng Rappang	11 Unit	82.500.000	Penyuluh	Kab. Sidenreng Rappang	11 Unit	67.912.500	Penyuluh
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Sidenreng Rappang	25 Unit	100.000.000	Kelompok Tani	Kab. Sidenreng Rappang	75 Unit	145.796.000	Kelompok Tani
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Sidenreng Rappang	3 Unit	267.301.000	Penyuluh	Kab. Sidenreng Rappang	11 Unit	250.370.000	Penyuluh
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Kab. Sidenreng Rappang	5 Unit	400.000.000	Kelompok Tani	Kab. Sidenreng Rappang	3 Unit	178.057.000	Kelompok Tani
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Sidenreng Rappang	20 Orang	15.000.000	-	Kab. Sidenreng Rappang	60 Orang	342.000.000	Penyuluh
3.27.07.2.01.0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	15.000.000	Penyuluh	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	88.922.000	Penyuluh
3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	15.000.000	Kelompok Tani	-	-	-	-
3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	442.664.600	-	-	-	-	-
					23.104.605.160				16.702.303.000	

BAB IV. PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2025 yang disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

IV.1 Catatan Penting

Catatan penting dalam Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2025 yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Produksi dan Produktivitas pada sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan diharapkan dapat terjaga dan meningkat sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap ketersediaan pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Pembangunan pangan dan pertanian perlu dipastikan penganggarnya dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah. Ketahanan pangan perlu dipastikan agar ketersediaan pangan tetap terjaga dan terjangkau oleh masyarakat.

IV.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2025 ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh pejabat struktural di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2025 sebaik-baiknya, sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Seluruh unsur di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan agar melaksanakan program dan kegiatan Renja tahun

2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsinya, melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Skala prioritas dalam rasionalisasi anggaran baik program/kegiatan dalam Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 selalu disinergikan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, baik rencana tahunan jangka menengah maupun jangka panjang.
4. Perlunya dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 agar program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2025 dapat dipastikan berjalan dengan baik.
5. Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

IV.3 Rencana Tindak Lanjut

Dokumen Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, secara normatif telah diupayakan sedemikian rupa sehingga memuat program/kegiatan selama tahun 2025. Beberapa indikator keberhasilan juga telah ditetapkan sebagai target yang harus dicapai. Untuk implementasi Renja, tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi, kerja keras dedikasi,

Rencana Kerja Perubahan 2025

loyalitas dan integritas dari seluruh jajaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian Rencana Kerja Perubahan ini disusun untuk dijadikan pedoman Tahun Anggaran 2025 dan diharapkan pelaksanaan seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik, dalam ikut serta mewujudkan tercapainya pembangunan yang lebih maju.

Pangkajene Sidenreng, 26 Juni 2025

Kepala Dinas
Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan
Ketahanan Pangan
Kabupaten Sidenreng Rappang



brahim, SP
19720223 200003 1 002